KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			FINAL/ HDAK FINAL			., 5.	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 2 5			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 5 6 3 0 8 8 7 6 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : NADIA PRIMA RESTI							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	7.945.000	7.945.000	0	5	397.250	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen							
			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0				
	nsi Pemerintah :	RUMAH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI KAL	IMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit C	Organisasi :		$\coprod$ $\sqcup$ $\sqcup$ $\sqcup$				
C.4 Tanggal	:	1 1 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penan	ıdatangan :	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah sa tandatangani secara elektronik.  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani selektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						·	
	<b>细胞型</b>						

C4NBI733